



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 11 April 2025

Halaman: 5

## Ngarsa Dalem: Perlu Dialog Selesaikan Polemik Penataan Kawasan Stasiun Lempuyangan

**YOGYA, TRIBUN** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai bahwa sengketa lahan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan warga Kampung Tegal Lempuyangan harus diselesaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Ngarsa Dalem menyerahkan sepenuhnya penjelasan soal status lahan di kawasan Stasiun Lempuyangan kepada pihak yang mengurus pengelolaan tanah-tanah milik Keraton Yogyakarta atau Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Yogyakarta.

"Wah itu yang aku kurang ngerti ya, sing ngerti kan (GKR) Mangkubumi (Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat) itu. Ojo takon aku. Alasannya apa? Saya kan enggak tahu," ujar Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (10/4).

Menanggapi polemik ini, Sultan mengatakan akan mempelajari duduk perkara yang ada sebelum kemudian mengambil sikap. Ia menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan dialog.

"Ya coba nanti kita selesaikan, bagaimana pun harus selesai itu kalau itu ada masalah. Tapi saya belum tahu kepasti-

annya. Jadi saya enggak ada pernyataan, nanti hanya akan menimbulkan masalah baru. Nanti saya dengar dulu dari kedua belah pihak," katanya.

"Ya biar yang mengundang lewat Mangkubumi, itu wewenangnya dia kok," tambahnya.

Sebelumnya, PT KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menyatakan bahwa penataan kawasan Stasiun Lempuyangan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Sekaligus, bagian dari upaya pengelolaan aset perusahaan.

Kawasan yang ditata mencakup 13 rumah dinas milik KAI di dalam area emplasemen stasiun. Penataan diperlukan seiring tingginya mobilitas penumpang di stasiun tersebut, yang setiap harinya melayani sekitar 15.643 penumpang kereta api jarak jauh dan KRL.

"Penataan ini merupakan bentuk komitmen KAI untuk menjaga aset rumah perusahaan sekaligus meningkatkan keselamatan dan pelayanan kepada penumpang," ujar Manajer Humas KAI Daop 6, Feni Novida Saragih, Rabu (9/4).

Feni juga menekankan bahwa la-

han tersebut merupakan Sultan Gro-und yang pengelolaannya telah diserahkan kepada KAI, lengkap dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Klaim kepemilikan warga lewat Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat dijadikan bukti sah.

Namun, rencana tersebut memicu penolakan dari warga Kampung Tegal Lempuyangan, Kelurahan Bausaran, Kemantren Danurejan, yang khawatir akan tergusur dari tempat tinggal yang sudah mereka huni sejak lama.

Ketua RW 1 Kampung Tegal Lempuyangan, Anton Handriutomo mengkritisi minimnya sosialisasi. Pihaknya kemudian mempertanyakan dasar hukum pengosongan yang direncanakan mulai Mei 2025.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyatakan belum dapat menentukan sikap sebelum memperoleh kejelasan terkait status hukum lahan tersebut. Ia menyebut telah menugaskan Wakil Wali Kota Wawan Hamawan membentuk tim kecil untuk melakukan koordinasi dengan Kasultanan Yogyakarta dan pihak terkait. "Kami mohon arahan dari Keraton terkait status tanah ini," kata Hasto. **(han)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005